

Lebak akan Bangun Hunian Tetap untuk Korban Bencana Alam

LEBAK (IM) - Pemerintah Kabupaten Lebak di Provinsi Banten tahun ini berencana membangun hunian tetap bagi korban banjir bandang dan tanah longsor tahun 2020 yang kehilangan tempat tinggal.

"Kita tahun ini dipastikan akan membangun hunian tetap (hunian tetap)," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama di Lebak, Rabu (8/9).

"Kami seluruhnya akan membangun hunian tetap itu sebanyak 378 unit," kata dia menambahkan.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Lebak sudah menyiapkan usul pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam di enam kecamatan kepada pemerintah pusat.

Namun, ia melanjutkan, tahun ini pemerintah akan merealisasikan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Kecamatan Cipanas, Sajira, Curug Bitung, Cimarga, dan Maja.

Ia menjelaskan, pembangunan hunian tetap baru bisa

dilaksanakan di lima kecamatan yang sudah memiliki lahan untuk pembangunan hunian tetap.

Pembangunan hunian tetap belum bisa dilaksanakan di Kecamatan Lebak Gedong karena pembebasan lahan untuk pembangunan hunian bagi korban bencana di wilayah tersebut belum tuntas.

Menurut Febby, lahan untuk pembangunan hunian tetap di Kecamatan Lebak Gedong berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan pengurusan izin penggunaannya masih dalam proses penyelesaian.

Hingga saat ini sebagian korban banjir dan tanah longsor di Lebak masih menempat hunian sementara dan berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan hunian tetap bagi mereka.

"Jika hujan dipastikan kebocoran dan jika kemarau kondisi rumah panas dan pengap," kata Iyan, Kepala Dusun Huntara Blok Cigobang I, mengenai kondisi hunian sementara korban bencana. ● **pra**



IDN/ANTARA

KELUARGA KORBAN KEBAKARAN LAPAS DIBAWA KE RS POLRI

Keluarga korban kebakaran lapas berjalan menuju bus untuk diberangkatkan ke RS Polri Kramat Jati di Lapas Kelas I Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9). Keluarga dan kerabat korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk proses identifikasi narapidana yang tewas karena kebakaran.

GURU MADRASAH DIGAJI RP 50 RIBU PER BULAN

Bupati Pandeglang: Anggaran Pemda Sedang Mengalami Refocusing

Kondisi keuangan Pemda Kabupaten Pandeglang saat ini tidak dalam keadaan normal. Ada anggaran yang harus dikurangi karena aspek pembangunan infrastruktur dan kesehatan, kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Ia mengaku sedang merumuskan kebijakan supaya bisa membantu kehidupan guru madrasah di wilayahnya.

PANDEGLANG (IM)

Bupati Pandeglang, Irna Narulita ikut menanggapi polemik gaji guru Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) yang hanya dibayar Rp 50 ribu per bulan. Irna

mengatakan, anggaran pemda saat ini sedang mengalami refocusing untuk penanganan pandemi dan pembangunan infrastruktur.

"Memang ada amanat perda, tapi kita lihat juga

kemampuan kita sekarang. Kondisinya pemda saat ini tidak dalam keadaan normal loh, ada anggaran yang harus dikurangi karena kebutuhan kita juga banyak aspek buat pembangunan infrastruktur dan kesehatan," katanya di Pandeglang, Banten, Rabu (8/9).

Irna menyebut kondisi pendidikan saat ini sedang terhambat oleh pandemi Covid-19. KBM di sekolah maupun madrasah di wilayah Pandeglang juga ikut terganggu karena tak bisa menggelar pembelajaran tatap muka.

Ia mengaku sedang meru-

mudahkan nanti ada solusi terbaiknya," ujarnya.

Sebelumnya, Kemenag Pandeglang juga angkat bicara mengenai polemik gaji guru madrasah yang hanya dibayar Rp 50 ribu per bulan.

Kemenag tak bisa berbuat banyak karena memang tak ada alokasi anggaran untuk menggaji guru MDTA tersebut.

"Kalau untuk honor (guru MDTA), memang tidak ada anggaran dari Kemenag. Tapi enggak tahu kalau dari yang lain," kata Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Pandeglang Agus Salim. ● **pra**

Akses Rumah Warga Serua Ciputat Ditutup Tembok

TANGSEL (IM) - Lurah Serua, Cecep Iswandi menyatakan, tembok yang menutup akses rumah warga di Jalan Pelikan RT 006 RW 009 dibangun di atas tanah pengembangan. Hal itu disampaikan Cecep menanggapi pernyataan warga terdampak pembangunan tembok penghalang, yang menyebut bahwa lahan di depan rumahnya diperuntukkan sebagai jalan umum.

"Sepengetahuan saya dan RT/RW, bahwa (lahan) pagar tembok tersebut memang milik pengembangan kompleks Bukit Nusa Indah," ujar Cecep melalui pesan singkat, Rabu (8/9).

Kendati demikian, Cecep tidak dapat menjelaskan secara rinci tujuan pengembang membangun tembok yang berimbas pada tertutupnya akses tiga rumah milik warga. Dia juga enggan menanggapi sikap berkeberatan para pemilik rumah yang akses utamanya tertutup tembok, sebagai keluhan warga Serua.

"Bukan keluhan warga, hanya 1-2 orang mungkin. Menurut saya yang dibilang warga itu lebih dari satu," kata Cecep.

Pihak Kelurahan Serua berencana memediasi warga dengan pengembang terkait pembangunan tembok yang menutup akses tiga rumah di Jalan Pelikan RT 006 RW 009, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan.

Lurah Serua, Cecep Iswandi menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas

keberatan warga dengan pembangunan tembok pembatas yang menghalangi akses menuju rumah mereka.

Ditembok

Akses menuju tiga rumah warga di kawasan Jalan Pelikan RT 006 RW 009, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, ditutup tembok oleh pihak yang disebut pengembang. Tembok yang membatasi permukiman warga dengan lahan kosong untuk perumahan itu mulai dibangun sejak Jumat (3/9), karena warga tidak membayar uang yang diminta pihak pengembang.

Salah seorang warga yang akses rumahnya terhalang tembok, Tarmo (50), mengaku di datangi oleh seorang perwakilan pengembang yang membangun tembok tersebut.

Orang itu meminta Tarmo membayar Rp 25 juta jika ingin akses menuju rumahnya tidak dibangun tembok pembatas.

"Waktu itu kan belum dipagar. Nah kalau saya bayar, tidak dipagar. Makanya sampai di angka Rp 15 juta-Rp 25 juta kalau enggak mau dipagar tembok," ujar Tarmo saat di wawancara, Selasa (7/9). Tarmo tak sanggup membayar uang yang diminta sehingga tembok setinggi dua meter itu dibangun tepat di depan rumahnya.

"Saya mikir dong, akhirnya saya (tawar) bilang Rp 5 juta. Itu pun tidak sekarang, saya akan saya usahakan. Dia enggak mau,

maunya Rp 15 juta," kata Tarmo.

"Ya sudah, saya merasa enggak punya kemampuan ke situ kan, saya pilih diam. Tiba-tiba ini hari Jumat kemarin ada tembok (dibangun)," sambungnya.

Lagi pula, Tarmo heran dengan pembangunan tembok tersebut. Sebab, sepengetahuan Tarmo, status tanah di depan rumahnya yang jadi lokasi berdirinya tembok itu diperuntukkan untuk jalan umum warga.

"Jadi di AJB (akta jual beli) itu, depan sini itu jalan, di kanan tanah orang lain, kiri tanah orang lain, belakang jalan," tutur Tarmo.

Tak hanya Tarmo, warga lainnya bernama Pujiono (51) juga diminta uang oleh pengembang tersebut. Namun, Pujiono juga tidak sanggup membayar uang yang diminta karena terlalu mahal. "Saya, saya juga ditawari, cuma uang dari mana. Penghasilan sehari-hari juga habis buat dapur," ujar Pujiono.

Dari pantauan di lokasi, tembok tersebut memiliki panjang kurang lebih 30 meter dengan tinggi sekitar dua meter. Tembok itu berdiri tepat di depan tiga unit rumah warga, termasuk rumah Tarmo dan Pujiono.

Akses yang biasa digunakan warga untuk keluar dan masuk kini tertutup. Proses pembangunan tembok penghalang tersebut tampak belum rampung sepenuhnya. Di sekitar lokasi, masih terdapat tumpukan batu bata, pasir, dan kerikil. ● **pp**



IDN/ANTARA

BUDIDAYA KUDA LAUT DI LAMPUNG

Petugas memilih indukan Kuda laut untuk dibudidayakan di Laboratorium Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Rabu (8/9). Kepala BBPBL Lampung Ujang Komarudin menyatakan ada 2.000 ekor Kuda laut hasil budidaya di Laboratorium BBPBL Lampung siap diekspor untuk memenuhi permintaan pasar.

KEBAKARAN DI LAPAS TANGERANG

Pemkot Tangerang Dirikan Posko untuk Keluarga Korban

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan mendirikan posko untuk keluarga korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah saat mengunjungi Lapas Kelas 1 Tangerang, Rabu (8/9).

"Pemkot Tangerang akan berupaya semaksimal mungkin membantu pihak lapas untuk mendirikan posko bagi keluarga warga binaan yang ingin mendapatkan informasi terkait kebakaran. Dan tadi saya sudah berbicara dengan Pak Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah Kemukham) Banten, Pak Kalapas, dan Pak Dirjen juga memang sedang dibuat skemanya seperti apa terkait posko," ungkapnya.

Arief memastikan, Pemkot Tangerang akan membantu dan memfasilitasi upaya mitigasi atas musibah kebakaran di lapas tersebut.

"Kami siap men-support kaitan beberapa yang memang perlu dirawat, atau dari kesehariannya, seperti trauma healing supaya mereka juga dapat tetap tenang dan kondusif," tegasnya.

Tak hanya akan membantu penanganan kesehatan bagi para korban, Pemkot Tangerang juga siap menerjunkan tenaga medis bila dibutuhkan selama proses healing bencana yang terjadi di lapas tersebut.

"Kita sudah siapkan tim kesehatan juga yang mungkin diperlukan dan alhamdulillah kita sudah support dari semalam sesaat setelah terjadi kebakaran yang datang bersama tim BPBD Kota Tangerang," tandasnya. ● **pp**

PLN Ingatkan Warga Bahaya Korsleting

TANGERANG (IM) - Berkaca dari kebakaran Lapas Tangerang yang diduga karena hubungan pendek listrik atau korsleting, PT PLN (Persero) mengimbau pelanggan untuk ikut menjaga keamanan kelistrikan dan instalasi di bangunan milik pelanggan guna mencegah risiko tersebut.

Manager PLN UP3 Cikokol, Adi Fitri Atmojo menjelaskan, dalam hal instalasi ini kewenangan PLN hanya sampai pada kWh meter. Sehingga peran serta pelanggan untuk ikut menjaga instalasi pelanggan yang menjadi tanggung jawabnya sangat vital.

"Instalasi di rumah pelanggan harus sering dicek dan dipastikan apakah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui Lembaga Inspeksi Terdaftar (LIT), penggunaannya juga harus dipastikan aman misalnya tidak menumpuk steker," katanya.

Alat kWh meter di bangunan milik pelanggan merupakan alat pengukur dan pembatas (APP) kelistrikan yang dipasang PLN. Sebagai pengukur, alat ini mencatat pemakaian listrik oleh pelanggan. Sebagai pembatas, kWh meter ini menjadi titik batas kewenangan antara PLN dan pelanggan.

"Dari kWh meter ke instalasi pelanggan adalah tanggung jawab pelanggan," jelas Adi Fitri.

Meski demikian, PLN juga menyediakan layanan pengaduan apabila terjadi keluhan dan gangguan di sisi instalasi pelanggan melalui fitur ListriQu di dalam aplikasi PLN Mobile.

"Aplikasi PLN Mobile sekarang sudah sangat lengkap dan mengakomodir kebutuhan pelanggan. Silakan download aplikasi PLN Mobile agar pelanggan dapat melaporkan ke petugas terkait potensi bahaya kelistrikan dan pengaduan pelanggan lainnya," kata Adi. ● **pp**

RUGIKAN NEGARA RP70 M

Eks Pejabat dan Pimpinan Ponpes Banten Didakwa Korupsi

SERANG (IM) - Lima terdakwa kasus hibah pondok pesantren di Banten didakwa telah melakukan korupsi dan merugikan negara senilai Rp 70 miliar. Kerugian ini berasal dari penyaluran hibah tahun 2018 senilai Rp 66 miliar dan di 2020 senilai Rp 117 miliar.

Lima terdakwa yaitu Irvan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra, Epich Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ponpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

Dalam dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa Irvan dan Toton tidak melakukan tahapan evaluasi, verifikasi, persyaratan administrasi, survei hingga kelayakan besaran uang hibah Pemprov Banten pada 2018. Terdakwa juga dinilai tidak cermat terhadap pengajuan pencairan dana hibah ponpes, sehingga penerima tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

"Dokumen proposal pengajuan hibah, naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pakta integritas serta dokumen proposal pencairan dan laporan pertanggungjawaban hibah dibuat dan ditandatangani oleh pihak selain pimpinan ponpes sebagaimana persyaratan dalam pencairan dana

bantuan hibah ponpes," kata JPU M Yusuf di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (8/9).

Penerimaan bantuan dana hibah oleh Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP juga menurut JPU tidak sesuai peruntukan dan tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah. "Tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan dana hibah yang lengkap dan sah atas bukti transfer dan bukti penggunaan dana pelaksanaan kegiatan," ujar Yusuf.

Di tahun 2018, lanjut JPU, pencairan dana hibah dari Biro Kesra Kesra Pemprov Banten diserahkan ke FSPP sebagai lembaga atau organisasi yang tidak berhak menerima dan menyalurkan hibah ponpes.

Sedangkan 2020, pencairan dana hibah dari Biro Kesra diserahkan kepada masing-masing ponpes. Dana hibah itu kemudian sebagian di antaranya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak sesuai NPHD. Yang tidak berhak itu adalah terdakwa Epich Saepudin, Tb Asep Subhi, dan terdakwa Agus Gunawan.

JPU menilai bahwa perbuatan kelima terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Tipikor. Atas dakwaan yang dibacakan para terdakwa mengajukan eksepsi kecuali terdakwa Agus Gunawan. ● **pra**



IDN/ANTARA

TARGET VAKSINASI COVID-19 PENYANDANG DISABILITAS DI JABAR

Relawan Karawang Tanggap Peduli menjemput lansia yang mengalami kondisi disabilitas untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 di Kampung Duren, Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/9). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat per 22 Agustus 2021 sebanyak 6.000 penyandang disabilitas sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dan menargetkan sasaran vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas mencapai 121.648 orang.